

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**



SKRIPSI

**OLEH :
CARLIN TASYA PUTRI
C1C010030**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU**

2014

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Bengkulu
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi**

**OLEH :
CARLIN TASYA PUTRI
C1C010030**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU**

2014

Skripsi oleh Carlin Tasya Putri

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Bengkulu, 9 Mei 2014

Pembimbing

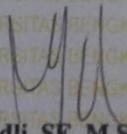


Dr. Fachruzzaman, SE, MDM., Ak,CA

NIP. 19710313 199601 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan



Dr. Fadli, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19730203 199802 1 001

Skripsi oleh Carlin Tasya Putri ini

**Telah diperiksa oleh pembimbing dan dipertahankan dihadapan dewan
penguji
pada hari, Jum'at, 9 Mei 2014**

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Fachruzzaman, SE, MDM, Ak, CA
NIP. 19710313 199601 1 001

Anggota I

Saiful, SE, M.SL, Ph.D, Ak
NIP. 19700108 199702 1 001

Anggota II

Robinsen, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19760308 200003 1 003

Anggota III

Eddy Suranta, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19721207 199802 1 001

Mengetahui
a.n Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Fahrudin J.S Pareke, SE, M.Si
NIP. 19710914 199903 1 004

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka berusaha mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS.Ar Ra’dad Ayat 11)

Hidup bukan sepenuhnya nasib, tapi hidup adalah bagaimana cara kita memilih (lebih tepatnya) hidup adalah pilihan kita sendiri

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

**Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, karunia dan kemudahan dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini
Rasullullah, Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu yang berguna bagi umat yang menjadikan suatu insan manusia yang berguna dan menjadi lebih**

Kedua orang tua yang tidak bosan-bosannya memberikan do’a, nasehat dan motivasi dalam menjalankan aktifitas dalam kehidupanku

Untuk orang yang telah berbuat baik kepadaku, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan

Almamaterku Universitas Bengkulu

THANKS TO

Dalam membuat skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan serta sumbangan pikiran dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- ◆ Kedua orang tua tercinta, Papa dan Mama terimakasih banyak atas do'a dan dukungannya yang telah diberikan selama ini.
- ◆ Bapak Dr. Fachruzzaman, SE, MDM., Ak,CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- ◆ Bapak Dr. Fadli, SE., M.Si., Ak., CA, Abdullah, SE., M.Si., Ak., CA, Bapak Eddy Suranta, SE, M.Si., Ak, CA dan Ibu Isma Coryanata, SE., M.Si., Ak, CA selaku dosen penguji seminar proposal yang telah banyak memberikan masukan untuk skripsi yang saya tulis.
- ◆ Bapak Eddy Suranta, SE, M.Si., Ak, CA , Bapak Saiful, SE, M.SI., Ph.D., Ak serta Bapak Robinson, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen penguji seminar hasil yang juga telah banyak memberikan masukan untuk skripsi yang saya tulis.
- ◆ Bapak Dr,Fadli.,SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku ketua jurusan akuntansi
- ◆ Ibu Lismawati,SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku sekretaris jurusan akuntansi
- ◆ Seluruh dosen pengajar di jurusan akuntansi yang telah membagikan ilmu yang dimiliki
- ◆ Bapak Prof. Lizar Alfansi, SE., MBA., Ph.D selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis
- ◆ Keluargaku, Papa, Mama dan Adik-adikku yang telah memberikan bantuan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai ditulis
- ◆ Aditku yang selalu membantu dan menemani dalam proses pembuatan skripsi ini.
- ◆ Sahabat-sahabatku Gendjer, DefiF, Dita, dan DeviA terimakasih untuk persahabatan yang telah terjalin sejak SMP semoga akan tetap

bertahan dan juga terimakasih atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

- ◆ Teman-teman khususnya Nadya, Mala, Nurcahya, Dwi, Rahayu, Eka, Selvi, Tukung, Oki, yang sama-sama berjuang dan telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.**
- ◆ Teman-teman seperjuangan angkatan '10, yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi.**
- ◆ Seluruh staf gedung k yang sudah sangat membantu.**
- ◆ Seluruh staf gedung S yang juga banyak membantu dalam mempermudah untuk memenuhi syarat penyusunan skripsi.**
- ◆ Seluruh staf dan pegawai bagian pengelolaan anggaran pada SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu, terimakasih banyak atas bantuannya yang bersedia untuk mengisi kuesioner yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.**
- ◆ Semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.**



JURUSAN AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

Yang diuji hari Jum'at, 9 Mei 2014, adalah hasil karya saya.

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan, pendapat, atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri berarti selar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Bengkulu batal saya terima.

Bengkulu, 2014
Yang membuat pernyataan

Carlin Tasya Putri
NPM. C1C010030

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING OF ABSORPTION BUDGET IN THE LOCAL GOVERNMENT UNIT OF WORK BENGKULU PROVINCE

By

Carlin Tasya Putri ¹⁾

Dr. Fachruzzaman, SE, MDM,. Ak,CA ²⁾

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of planning documents, administrative records, competency of human resources, procurement documents and the money supply to the absorption in the local government unit of Bengkulu Province. The samples were 44 respondents who occupy positions in fields related to the budget, including the manufacturer's official commitments, official technical implementation activities, signatories warrant officer and treasurer to pay the 11 working units Bengkulu Provincial government.

The results of the study with multiple linear regression showed competence of human resources has a significant effect on the absorption of the budget, procurement documents have a significant effect on the absorption of the budget and the money supply has a significant effect on absorption. Planning document has no influence on the absorption and administrative records have no effect on absorption.

Key words : the planning documents, administrative records, competency of human resources, procurement documents, money supply, absorption budget.

1) Student

2) Supervisor

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

Oleh

**Carlin Tasya Putri ¹⁾
Dr. Fachruzzaman, SE, MDM., Ak,CA ²⁾**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan dan uang persediaan terhadap penyerapan anggaran pada SKPD pemerintah Provinsi Bengkulu. Sampel penelitian adalah 44 responden yang menduduki jabatan di bidang yang berkaitan dengan anggaran, diantaranya adalah pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penandatanganan surat perintah membayar dan bendahara pengeluaran pada 11 SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Hasil penelitian dengan regresi linier berganda menunjukkan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran, dokumen pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran dan uang persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dokumen perencanaan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran dan pencatatan administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Kata kunci : dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan, uang persediaan, penyerapan anggaran

- 1) Mahasiswa
- 2) Dosen Pembimbing

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Fachruzzaman, SE, MDM., Ak,CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Fadli, SE., M.Si., Ak., CA, Abdullah, SE., M.Si., Ak., CA, Bapak Eddy Suranta, SE, M.Si., Ak, CA dan Ibu Isma Coryanata, SE., M.Si., Ak, CA selaku dosen penguji seminar proposal yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Eddy Suranta, SE, M.Si., Ak, CA, Bapak Saiful, SE, M.SI., Ph.D., Ak serta Bapak Robinson, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen penguji seminar hasil yang telah banyak memberikan masukan untuk skripsi yang saya tulis. Serta Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi yang juga telah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Fadli,SE.,M.Si.,Ak.,CA sebagai ketua jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis dan Ibu Lismawati,SE.,M.Si.,Ak.,CA sekretaris Jurusan Akuntansi.
5. Ibu Lisa Martiah Nila P, SE.,M.Si., Akt selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama menempuh studi di Universitas Bengkulu.
6. Bapak Prof.Lizar Alfansi,SE.,MBA.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
7. Dr.Ridwan Nurazi.,SE.,M.Sc.,Ak selaku Rektor Universitas Bengkulu.
8. Seluruh staf Gedung K Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
9. Selur staf fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu
10. Seluruh pegawai SKPD Provinsi Bengkulu yang telah menjadi responden dalam penelitian ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, maka dari itu penulis mengharapkan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Bengkulu, 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
ABSTRACK	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Masalah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Stakeholder	9
2.1.2 Anggaran dan Penganggaran.....	10
2.1.3 Penyerapan Anggaran	11
2.1.4 Sistem Penganggaran di Indonesia.....	12
2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran	13
2.2 Hasil Penelitian sebelumnya.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	21
2.4 Hipotesis	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian	29
3.2.1 Variabel Independen	30
3.2.1.1 Dokumen Perencanaan	30
3.2.1.2 Pencatatan Administrasi	31
3.2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia	32
3.2.1.4 Dokumen Pengadaan	33
3.2.1.4 Uang Persediaan	34
3.2.2 Variabel Dependen.....	35
3.2.2.1 Penyerapan Anggaran.....	35
3.3 Populasi dan Sampel.....	36

3.4 Metode Pengumpulan Data	37
3.5 Metode Analisis Data	38
3.5.1 Uji Kualitas Data.....	38
3.5.1.1 Uji Validitas.....	38
3.5.1.2 Uji Reliabilitas	38
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	39
3.5.2.1 Uji Normalitas	39
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	39
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	39
3.5.3 Uji Hipotesis	40
3.5.3.1 Uji F.....	40
3.5.3.2 Uji koefisien determinasi disesuaikan	41
3.5.3.3 Uji Statistik t.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Deskripsi Data	42
4.1.2 Deskripsi Responden.....	44
4.2 Statistik Deskriptif Variabel	45
4.3 Hasil Uji Kualitas Data.....	51
4.3.1 Hasil Uji Validitas.....	51
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas	52
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	53
4.4.1 Hasil Uji Normalitas	53
4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	55
4.5 Hasil Pengujian Hipotesis.....	55
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	56
4.5.2 Uji Kelayakan Model (F test).....	56
4.5.3 Uji statistik t	57
4.6 Pembahasan	59
4.6.1 Pengaruh Dokumen Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran	59
4.6.2 Pengaruh Pencatatan Administrasi terhadap Penyerapan Anggaran	61
4.6.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran.....	63
4.6.4 Pengaruh Dokumen Pengadaan terhadap Penyerapan Anggaran	64
4.6.5 Pengaruh Uang Persediaan terhadap Penyerapan Anggaran	66

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Implikasi Hasil Penelitian.....	69
5.3 Keterbatasan	72

5.4 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	21
---	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Rincian dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	43
Table 4.2	Deskripsi Responden.....	44
Table 4.3	Statistik Deskriptif Variabel	46
Table 4.4	Persentase Distribusi Frekuensi Jawaban Responden	46
Table 4.5	Hasil Uji Validitas	52
Table 4.6	Hasil Uji Reliabilitas	53
Table 4.7	Hasil Uji Normalitas.....	53
Table 4.8	Hasil Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	55
Table 4.10	Hasil Analisis regresi Linier Berganda	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** **Daftar Nama 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu**
- Lampiran 2** **Hasil Output Jawaban responden Variabel Penyerapan Anggaran**
- Lampiran 3** **Hasil Output Jawaban Responden Variabel Dokumen Perencanaan**
- Lampiran 4** **Hasil Output Jawaban Responden Variabel Pencatatan Administrasi**
- Lampiran 5** **Hasil Output Jawaban Responden Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia**
- Lampiran 6** **Hasil Output Jawaban Responden Variabel Dokumen Pengadaan**
- Lampiran 7** **Hasil Output Jawaban Responden Variabel Uang Persediaan**
- Lampiran 8** **Statistik Deskriptif**
- Lampiran 9** **Hasil Uji Validitas Data Variabel Penyerapan Anggaran**
- Lampiran 10** **Hasil Uji Validitas Data Variabel Dokumen Perencanaan**
- Lampiran 11** **Hasil Uji Validitas Data Variabel Pencatatan Administrasi**
- Lampiran 12** **Hasil Uji Validitas Data Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia**
- Lampiran 13** **Hasil Uji Validitas Data Variabel Dokumen Pengadaan**
- Lampiran 14** **Hasil Uji Validitas Data Variabel Uang Persediaan**
- Lampiran 15** **Hasil Uji Reliabilitas**
- Lampiran 16** **Hasil Uji Normalitas**
- Lampiran 17** **Hasil Uji Multikolinearitas**
- Lampiran 18** **Hasil Uji Heteroskedastisitas**
- Lampiran 19** **Hasil Regresi Linier Berganda**
- Lampiran 20** **Surat Bukti Penelitian pada 11 SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengeluaran pemerintah yang mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal. Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Sebagai negara yang sedang giat membangun, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat dan cepat bagi pergerakan roda perekonomian

Peran pemerintah disini dapat dinyatakan dalam bentuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dan sumber daya manusia yang memberikan manfaat terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana jika segala sesuatunya dilakukan secara efektif dan efisien, tetapi pada kenyataannya masih banyak hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan tidak dapat terpenuhi.

Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya penyerapan anggaran yang masih sering terjadi khususnya di Provinsi Bengkulu. Terdapat beberapa SKPD yang penyerapan anggarannya masih rendah dan mendapat raport merah yaitu dengan serapan anggaran yang masih dibawah 90%. (Rakyat Bengkulu, 2013). Persentase mengenai serapan anggaran yang rendah ini tidak diatur dalam Undang-Undang mengenai anggaran, tetapi pada saat menjelang akhir tahun anggaran instansi pemerintah berusaha menyerap anggaran mendekati 100%, agar tidak ditetapkan penyerapan anggarannya rendah.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan penyerapan anggaran yang rendah ini seperti adanya anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun, terbukti dengan kecenderungan persentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan III kurang dari 75%. Dengan persentase tersebut maka timbul pertanyaan, apakah persentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan III kurang dari 75% berarti penyerapannya tergolong sedang atau rendah. Dalam penilaian penyerapan anggaran yang proporsional atau tidak ini masih belum jelas tolok ukurnya. Maka dari itu jika ingin lebih proporsional dalam menilai penyerapan anggaran, maka perlu dilihat target penyerapan anggaran yang telah

disusun di awal, apakah telah sesuai target atau tidak. Selain itu penyerapan anggaran yang rendah disebabkan juga oleh adanya revisi anggaran seperti contoh penghematan anggaran yang berdasarkan perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah. (bpkp.go.id)

Kegagalan target penyerapan anggaran ini mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. (Cardisiawan, 2009).

Penyerapan anggaran yang terlambat ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi. Banyak faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya adalah faktor perencanaan, faktor administrasi, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor dokumen pengadaan dan faktor Uang Persediaan (UP).

Faktor perencanaan sangat berpengaruh terhadap daya serap anggaran hal ini terlihat dari adanya anggaran kegiatan yang diblokir/tanda bintang karena belum ada data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPR.

Pada faktor administrasi terdapat permasalahan mengenai adanya kesalahan dalam penentuan akun sehingga diperlukan revisi dokumen anggaran. Pada faktor Sumber Daya Manusia (SDM) permasalahan terjadi dikarenakan adanya SDM pelaksana pengadaan barang dan jasa kurang berkompeten. Di Provinsi Bengkulu keahlian pengadaan hanya terbatas pada sekelompok kecil individu dalam jajaran Instansi tertentu. Pemerintah Provinsi Bengkulu terdiri dari 41 Dinas/Badan/Kantor/Instansi, dari 324 personil yang lulus sertifikasi nasional pengadaan barang dan jasa bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sebanyak 138 personil. Hal ini menunjukkan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak merata dari distribusi personil, karena 42.6% dari seluruh personil yang memiliki sertifikat pengadaan terpusat hanya pada satu instansi, sedangkan pada instansi lain ada yang belum memiliki pegawai yang lulus sertifikasi pengadaan. (Siregar, 2008).

Pada faktor dokumen pengadaan permasalahan terjadi pada kesulitan dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) . Sedangkan pada faktor Uang Persediaan (UP) permasalahan terjadi dikarenakan adanya pengajuan Uang Persediaan (UP) sebanyak 2 kali pengajuan dikarenakan kebutuhan perkantoran memerlukan dana yang cukup besar.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Priatno (2013) yang menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar, hasil penelitiannya menghasilkan 2 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya adalah faktor perencanaan serta faktor pengadaan barang dan jasa dan 1 faktor yang tidak mempengaruhi

penyerapan anggaran yaitu faktor administrasi dan faktor SDM. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Miliasih (2012) mengenai analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian negara/lembaga TA 2010 di wilayah pembayaran KPPN Pekanbaru menghasilkan dua faktor utama yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja yaitu kebijakan teknis dan kultur pengelolaan anggaran di satuan kerja. Kuswoyo (2011) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor penyebab penumpukan anggaran belanja diakhir tahun anggaran pada satuan kerja di wilayah KPPN Kediri yang menghasilkan empat faktor diantaranya faktor perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa, dan faktor internal satker

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Herriyanto (2012) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar. Hasil penelitiannya menghasilkan 5 faktor yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran yang diantaranya adalah faktor perencanaan, administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dokumen pengadaan, dan Ganti Uang Persediaan (GUP).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini diteliti di tempat yang berbeda, yaitu di Provinsi Bengkulu. Alasan peneliti untuk mengambil penelitian dengan judul ini adalah karena adanya fenomena yang terjadi di Provinsi Bengkulu mengenai beberapa SKPD yang mengalami penyerapan anggaran yang masih rendah, sehingga peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran agar SKPD di

Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat mengevaluasi hal-hal apa saja yang dapat ditingkatkan agar penyerapan anggaran juga dapat meningkat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali apakah dengan teori yang sama, tetapi pada waktu dan tempat yang berbeda akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dengan menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran dimana peneliti meneliti di beberapa SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu. Peneliti juga memfokuskan penyerapan anggaran setelah revisi pengeluaran anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah dokumen perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran?
- 2) Apakah pencatatan administrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran?
- 3) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran?

- 4) Apakah dokumen pengadaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran?
- 5) Apakah uang persediaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui apakah dokumen perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran?
- 2) Untuk mengetahui apakah pencatatan administrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran?
- 3) Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran?
- 4) Untuk mengetahui apakah dokumen pengadaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran?
- 5) Untuk mengetahui apakah uang persediaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangsih dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu terutama kaitannya dengan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran.
- 2) Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang anggaran pemerintah daerah

serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan masalah dalam melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yang terjadi di Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui pengisian kuisioner pada beberapa SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Peneliti memfokuskan analisis faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dengan menggunakan faktor perencanaan yang difokuskan pada dokumen perencanaannya, faktor administrasi yang difokuskan pada pencatatan administrasinya, faktor sumber daya manusia yang difokuskan pada kompetensi sumber daya manusianya, faktor dokumen pengadaan dan faktor uang persediaan. Peneliti juga memfokuskan penyerapan anggaran setelah revisi pengeluaran anggaran yang terjadi di beberapa SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1. 1 Teori *Stakeholder*

Pengertian *stakeholder* menurut Freeman dan Reed (Ulum, 2009) adalah “sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh suatu tujuan pencapaian tertentu”. Para pemegang saham, para supplier, bank, para *customer*, pemerintah dan komunitas memegang peranan penting dalam organisasi (berperan sebagai *stakeholder*).

Pemerintahan merupakan bagian dari beberapa elemen yang membentuk masyarakat dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan tersebut kemudian menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara pemerintah dan para *stakeholder* yang berarti pemerintah harus melaksanakan peranannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan sendiri maupun *stakeholder* lainnya dalam sebuah sistem sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dihasilkan dan dilakukan oleh masing-masing bagian dari stakeholder akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Sejalan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemerintah sebagai *stakeholder* yang memiliki peran penting dalam proses memajukan suatu daerah, pemerintah diharapkan mampu untuk melakukan upaya pembangunan secara maksimal. Kemajuan suatu daerah dilihat dari bagaimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu daerah harus

mampu mengelola anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat didaerahnya.

Kepentingan rakyat yang dimaksudkan disini adalah bagaimana anggaran yang telah disahkan tersebut memang merupakan representasi dari apa yang diinginkan oleh rakyat sehingga hasilnya akan kembali kepada rakyat itu juga nantinya. Pelayanan, Strategi, dan Operasi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah tersebut menjadi tanggung jawab bersama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai *stakeholder* pemerintah daerah. Hal tersebut dapat tercermin dalam proses penggunaan anggaran yang efektif dan efisien sehingga tidak menyebabkan penyerapan realisasi yang rendah.

2.1.2 Anggaran (*Budget*) dan Penganggaran (*Budgeting*)

Anggaran merupakan salah satu alat vital suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Anggaran merupakan sarana utama untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam setiap perusahaan. Rencana ini biasanya mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan suatu pendekatan formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengendalian. Dalam pasal 14 ayat (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 telah disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga.

“Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran” (Mardiasmo, 2009:61). Terdapat hubungan yang erat antara anggaran,

perencanaan dan pengendalian, dimana perencanaan digunakan untuk melihat kedepan terkait dengan tindakan apa yang seharusnya diambil untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan pengendalian lebih melihat kebelakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan perencanaan.

2.1.3 Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002. (Kuncoro, 2013).

“Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, berapa yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan” (Mardiasmo, 2009). Dalam teori ekonomi makro, belanja pemerintah merupakan salah satu elemen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Belanja pemerintah, khususnya belanja barang dan jasa, merupakan salah satu komponen utama yang membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).

PDB dibentuk melalui unsur-unsur pengeluaran konsumsi pribadi, investasi swasta, ekspor netto (ekspor – impor), dan belanja pemerintah. Semakin besar keuangan negara yang dibelanjakan, maka akan semakin besar porsi pemerintah dalam membentuk PDB, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri terbentuk dari peningkatan jumlah PDB. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan PDB tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan bidang ekonomi.

Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidaknya lebih dari 80% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu SKPD menjadi tolak ukur kinerja dari SKPD tersebut.

2.1.4 Sistem Penganggaran di Indonesia

Sistem penganggaran di Indonesia tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Murwanto dalam Herriyanto (2012) APBN adalah rencana tahunan keuangan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berisi daftar sistematis dan terperinci atas rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1

Januari–31 Desember) dan ditetapkan dengan Undang-Undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan adalah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mengarahkan perekonomian nasional dan menstimulus pertumbuhan ekonomi sehingga besarnya penyerapan akan berdampak pada semakin besarnya daya dorong terhadap pertumbuhan. Rasio realisasi penyerapan belanja Kementerian atau Lembaga terhadap pagu anggaran belanja merupakan suatu bentuk indikator efektivitas belanja negara. Selain itu kebijakan APBN diharapkan dapat merespon dinamika rakyat baik yang terkait dengan perkembangan perekonomian secara luas, maupun kehidupan rakyat itu sendiri, sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang bersifat fleksibel (Rahayu, 2011).

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

2.1.5.1 Dokumen Perencanaan

Dasar hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan (Miliasih, 2012) sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo UU 12 tahun 2008;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dokumen perencanaan di daerah menurut Pinto (2013) terdiri dari:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan rencana untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintahan daerah provinsi sesuai Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah.
- 3) Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah.
- 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah
RKP Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, wajib disusun oleh Daerah sebagai landasan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

5) Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur, beserta rincian pendanaannya.

2.1.5.2 Pencatatan Administrasi

Administrasi dalam arti sempit. Menurut Handyaningrat (1988:2) mengatakan “Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Administrasi dalam arti luas. Menurut Gie (1980) mengatakan “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga

pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan suatu atau banyak orang terlibat di dalamnya.

2.1.5.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Nawawi (2001) ada tiga pengertian Sumber Daya Manusia yaitu:

- 1) Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
- 2) Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- 3) Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh pengelolaan anggaran dan SDM yang salah sangat banyak seperti contohnya pada aspek ekonomi, dimana karena adanya kesalahan pengelolaan anggaran dan penetapan SDM yang salah maka kualitas dari pelayanan akan menurun. Dalam hal ini proses perekonomian Indonesia akan lambat karena ketidakmampuan SDM dalam mengelola dengan baik. Di era globalisasi ini tentunya Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan SDM yang mampu mengelola anggaran dengan baik.

KKN merupakan sebuah penyakit yang krusial yang sangat-sangat membunuh perekonomian Indonesia. SDA yang melimpah tidak bisa dikelola dengan baik oleh aparatur pemerintah (SDM) karena kualitasnya kurang. Kualitas

SDM yang rendah juga membuat sebuah proses yang lambat dalam pelayanan administrasi, contohnya dalam mengurus izin usaha.

2.1.5.4 Dokumen Pengadaan

Civiliana (2013) mengatakan berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jenis dokumen pengadaan terdiri dari dokumen pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dan dokumen pengadaan jasa konsultasi. Dokumen pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya terdiri dari dokumen pemilihan penyedia dan dokumen pasca/prakualifikasi. Sedangkan dokumen pengadaan jasa konsultasi terdiri dari dokumen pemilihan penyedia dan dokumen prakualifikasi.

Informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen (Herriyanto, 2012) diantaranya:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang diterapkan
- 2) Jenis kontrak
- 3) Sumber dana
- 4) Metoda pengadaan
- 5) Nilai kontrak
- 6) Standar-standar Nasional Indonesia

Ketentuan pokok dalam penyusunan dokumen pengadaan (Rahayu, 2011) antara lain:

- 1) Dokumen pengadaan disiapkan panitia/pejabat pengadaan dan disahkan pengguna barang/jasa.

- 2) Isi harus lengkap dan jelas, serta tidak menimbulkan penafsiran jamak (multi tafsir).
- 3) Perubahan (adendum) dokumen diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5.5 Uang Persediaan (UP)

Amir (2013) menjelaskan Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*) yang diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. UP hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran yang tidak mungkin dilaksanakan dengan pembayaran secara langsung atau dapat diartikan kegiatan yang sifatnya insidental/mendesak. Hal ini wajib dipahami oleh pengelola keuangan baik KPA, PPK, PPTK, PP SPM dan Bendahara Pengeluaran. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GUP adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Penggunaan atas UP ini nantinya akan dibayar ke kas daerah melalui Ganti Uang Persediaan (GUP). Undang-Undang yang mendasari mengenai GUP ini

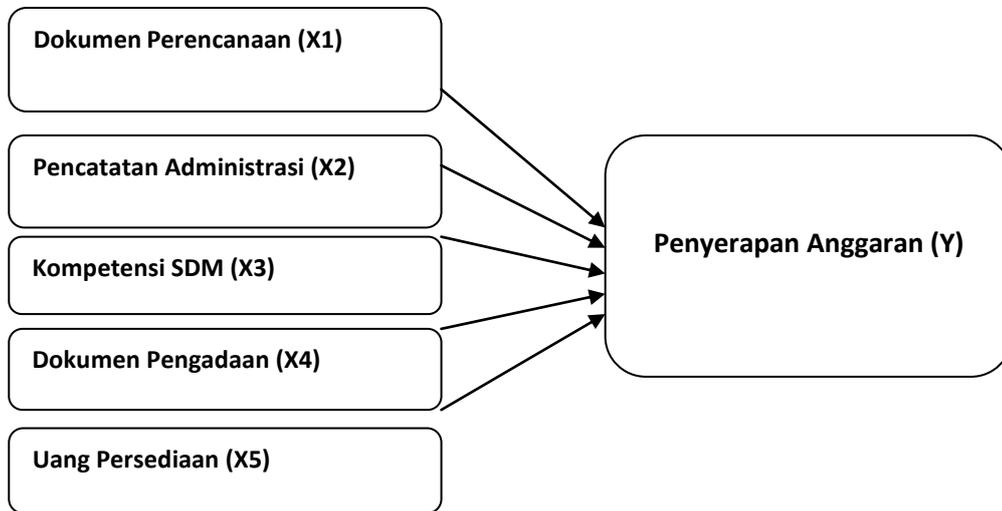
diantaranya adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Syarat dalam pengajuan TUP yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda, digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Negara kecuali mendapatkan dispensasi perpanjangan waktu pertanggungjawaban TUP lebih dari satu bulan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Judul dan Peneliti	Analisis Data	Hasil Penelitian
<p>1. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.</p> <p>Priatno (2013)</p>	<p>Analisis faktor dan regresi logistik</p>	<p>Menghasilkan dua faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar yaitu faktor perencanaan dan faktor pengadaan barang dan jasa, serta faktor administrasi dan SDM yang tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.</p>
<p>2. Analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian negara/lembaga TA 2010 di wilayah pembayaran KPPN Pekanbaru</p> <p>Miliasih (2012)</p>	<p>Tabel analisis dengan <i>cross Tabulation</i></p>	<p>Menghasilkan dua faktor utama yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja yaitu kebijakan teknis dan kultur pengelolaan anggaran di satuan kerja.</p>
<p>3. Melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta atas 97 variabel.</p> <p>Herriyanto (2012)</p>	<p>Analisis faktor eksploratori (Eksploratory Factor Analysis-EFA)</p>	<p>Menghasilkan lima faktor utama yang terbentuk yaitu faktor perencanaan, Administrasi, SDM, Dokumen Pengadaan, dan Ganti Uang Persediaan.</p>
<p>4. Faktor-faktor penyebab penumpukan anggaran belanja diakhir tahun anggaran pada saruan kerja di wilayah KPPN Kediri</p> <p>Iwan Dwi Kuswoyo (2011)</p>	<p>Analisis faktor</p>	<p>Menghasilkan empat faktor diantaranya faktor perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa, dan faktor internal satker.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 2.3



2.4 Hipotesis

1) Dokumen Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran

Dalam menjalankan roda pemerintahan peran pemerintah sebagai pengelola keuangan negara sangatlah penting untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan tersebut tercermin dalam APBD, yang mana APBD diharapkan dapat digunakan dan dikelola secara tepat waktu dan tepat sasaran sehingga realisasi anggaran pun dapat terserap secara optimal.

Anggaran sebagai salah satu sumber dana yang digunakan dalam kegiatan membangun guna kepentingan masyarakat pada penyusunannya harus memperhitungkan kemungkinan rencana belanja dana yang baiknya digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan fungsi anggaran sebagai alat perencanaan.

Perencanaan anggaran tersusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen perencanaan memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang disebut dengan rencana kerja. Setiap Rencana Kerja menjadi landasan dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring implementasi rencana dalam maksud menghasilkan setiap sasaran hasil kinerja pembangunan.

Visi, misi, dan program Kepala Daerah menjadi bahan utama penyusunan agenda kerja selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) dan memperhatikan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas).

Kuswoyo (2011) meneliti mengenai faktor-faktor penyebab penumpukan anggaran belanja diakhir tahun anggaran pada satuan kerja di wilayah KPPN Kediri memberikan hasil bahwa faktor perencanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyebab penumpukan anggaran belanja. Penelitian yang dilakukan oleh Priatno (2013) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar juga menghasilkan faktor perencanaan memiliki pengaruh signifikan terhadap

penyerapan anggaran satuan kerja dan penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa perencanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Dokumen perencanaan disini dapat dilihat pengaruhnya terhadap penyerapan anggaran melalui adanya revisi pengeluaran anggaran, dimana adanya revisi DIPA karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat menunda realisasi anggaran sehingga berdampak pada penyerapan anggaran.

Dokumen perencanaan menjadi salah satu faktor yang ingin penulis uji disini dengan item pembentuk faktor beberapa diantaranya adalah anggaran kegiatan diblokir/tanda bintang karena belum ada data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPRD, anggaran tidak selaras dengan RPJMD, mata anggaran tidak tersedia untuk kegiatan tertentu, DIPA perlu revisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan, revisi DIPA perlu persetujuan pejabat berwenang, persetujuan revisi DIPA dari pejabat berwenang terlambat diterima, proses revisi anggaran mengalami keterlambatan, perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) terlambat ditetapkan.

Maka berdasarkan landasan teori dan temuan empiris diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Dokumen perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

2) Pencatatan Administrasi terhadap Penyerapan Anggaran

Administrasi dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa administrasi menjadi salah satu bagian dari proses pembangunan, karena kegiatan yang dilakukan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan daerah yang disusun dalam sistem pemerintahan.

Jika bagian administrasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka hasil dari proses dalam pencapaian tujuan pun dapat tercapai. Administrasi juga dapat dikatakan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan.

Penelitian yang dilakukan Herriyanto (2012) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa administrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

Pencatatan administrasi menjadi salah satu faktor yang ingin penulis uji disini dengan item pembentuk faktor diantaranya adalah salah dalam penentuan akun, masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek, kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran, adanya tambahan pagu karena ABT, tambahan/luncuran PHLN/PHDN, penerimaan hibah, berubahnya pelaksanaan kegiatan atas dasar memo kepala daerah, verifikasi yang terlalu lama dari PPKAD/BUD.

Maka berdasarkan landasan teori dan temuan empiris diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pencatatan administrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

1) Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran

Salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya roda pemerintahan ini adalah sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari bagaimana manusia sebagai tenaga kerja menggunakan potensi fisik dan psikis yang ia miliki secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi (lembaga).

Pemerintah serta struktur dibawahnya sebaiknya mampu mewujudkan impian masyarakat melalui pembangunan daerah, karena pemerintah yang memiliki jabatan dan kuasa sebagai pengelola keuangan memiliki peran penting guna perwujudan harapan masyarakat. Fungsi pemerintah sebagai SDM dapat diwujudkan dalam prakteknya melalui kegiatan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara dalam penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

SDM sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan penganggaran terlihat pada fungsi manusia sebagai satuan kerja yang memiliki tugas salah satunya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang harus memahami dengan baik tata cara

dan prosedur teknis pengadaan barang dan jasa. Sehingga kompetensi SDM menjadi salah satu faktor yang ingin penulis uji disini dengan item pembentuk faktor diantaranya adalah SDM pelaksana pengadaan barang dan jasa kurang kompeten, panitia pengadaan barang dan jasa melaksanakan tugas lebih dari satu (rangkap tugas), keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat. Maka berdasarkan landasan teori dan temuan empiris diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

2) Dokumen Pengadaan terhadap Penyerapan Anggaran

Dalam kegiatan pembelian barang dan jasa pemerintah diperlukan penyusunan dokumen pengadaan. Dalam penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa terdapat beberapa urgensi penyusunan dokumen pemilihan penyedia seperti menjadi dasar dalam pelaksanaan dalam pelelangan sampai pelaksanaan kontrak, kesalahan dokumen yang dapat berakibat fatal dan belum adanya standar dokumen yang berlaku secara nasional. Terdapat ketentuan pedoman penyusunan dokumen pengadaan yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa dokumen pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Dokumen pengadaan menjadi salah satu faktor yang ingin

penulis uji disini dengan item pembentuk faktor diantaranya kesulitan dalam menentukan harga perkiraan sendiri (HPS), HPS tidak ditentukan berdasarkan keahlian dan tidak melalui survei pasar, dan pejabat/pengelola keuangan sering mengalami mutasi. Maka berdasarkan landasan teori dan temuan empiris diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H4: Dokumen pengadaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

3) Uang Persediaan terhadap Penyerapan Anggaran

Dalam mekanisme pengeluaran APBN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dikenal mekanisme pengeluaran langsung dan pengeluaran melalui uang persediaan. Untuk membantu pengelolaan uang persediaan pada kantor/satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga, kepala satker dapat menunjuk Pemegang Uang Muka (PUM). PUM bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DIPA.

Penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa ganti uang persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Salah satu UU yang mendasari mengenai GUP ini adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ganti uang persediaan menjadi salah satu faktor yang ingin penulis uji disini dengan item pembentuknya antara lain, kegiatan sudah dilaksanakan dengan UP tetapi

belum diganti melalui Ganti Uang Persediaan (GUP), adanya pengajuan Uang Persediaan (UP) sebanyak 2 kali pengajuan dikarenakan kebutuhan perkantoran memerlukan dana yang cukup besar, dan adanya sisa UP/TUP yang harus disetorkan ke kas negara. Maka berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H5: Uang persediaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survey. Menurut Nawawi (2003 : 64) metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian deskriptif adalah metode survey. Metode survey adalah penelitian yang mengambil sample dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 1998).

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Realisasi anggaran merupakan tindakan menindaklanjuti rencana anggaran sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang di dalam APBN. Anggaran dapat terserap secara maksimal ataupun tidak. Saat ini di Provinsi Bengkulu terdapat beberapa SKPD yang mengalami penyerapan anggaran yang rendah. Penyerapan anggaran yang rendah ini disebabkan selain karena tidak dijalankannya program-program yang sudah direncanakan mengingat anggaran yang besar sudah disetujui dan juga karena adanya kemungkinan dalam pelaksanaan program terdapat beberapa hambatan yang dapat menunda terselesainya program sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pada penelitian ini akan dilihat apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu.

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini, terdapat lima variabel yang tergolong dalam variabel independen yaitu:

3.2.1.1 Dokumen Perencanaan

Perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan yang direncanakan akan sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan. Berkaca pada sistem penganggaran yang sedang kita laksanakan saat ini (yang menghasilkan produk dokumen anggaran/RKA-KL) dan sistem perencanaan (yang menghasilkan produk dokumen perencanaan/RKP) maka, kedua produk tersebut harusnya ada benang merah secara substansi. Apa yang tertuang dalam dokumen perencanaan beserta informasi di dalamnya (*outcome* dan indikator kinerja pada tingkat program/kegiatan) seharusnya dapat dioperasionalkan dalam dokumen penganggaran. Hal tersebut tidak terlihat selama ini, dikarenakan masih sering terjadi adanya anggaran kegiatan yang diblokir sehingga menyebabkan perencanaan-perencanaan yang tertuang didalam dokumen perencanaan perlu dilakukan revisi. Jadi dapat dikatakan bahwa keterkaitan yang ada pada kedua dokumen tersebut hanya sebatas pada nama program dan kegiatan. Dari pernyataan tersebut maka faktor dokumen perencanaan memiliki hubungan dengan penyerapan anggaran. Pada penelitian ini akan dilihat apakah dokumen perencanaan menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi penyerapan anggaran atau tidak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan butir pertanyaan sebanyak sembilan pertanyaan dalam sebuah kuisioner. Kuisioner ini telah dikembangkan dalam penelitian Herriyanto (2012).

3.2.1.2 Pencatatan Administrasi

Administrasi merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Administrasi pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi Pemerintahan Daerah adalah keseluruhan dari bentuk penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Daerah secara intensif kepada masyarakat baik itu pemerintahan tingkat I maupun pemerintahan tingkat II, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan sumber-sumber daya yang ada supaya tujuan negara dapat tertata dengan baik. Tetapi dalam penyelenggaraan pelayanan itu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerja sama dari beberapa orang. Salah satu contoh sistem pencatatan administrasi yang memiliki kaitan dengan penyerapan anggaran adalah adanya salah dalam penentuan akun pada dokumen anggaran yang mungkin disebabkan pegawai dibagian perencanaan kurang teliti dalam penentuan akun sehingga perlu dilakukan revisi dokumen anggaran. Hal tersebut dapat menunda pelaksanaan kegiatan yang seharusnya direalisasikan tepat waktu.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa administrasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran yang mungkin akan terserap secara maksimal atau tidak, karena administrasi merupakan salah satu bagian dari proses penganggaran. Maka dari itu variabel administrasi juga menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan butir pertanyaan sebanyak enam pertanyaan dalam sebuah kuisisioner. Kuisisioner ini telah dikembangkan dalam penelitian Herriyanto (2012).

3.2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi. SDM memiliki hubungan dengan perencanaan, karena terdapat tujuan dari perencanaan SDM yang diantaranya adalah untuk kepentingan individu, kepentingan organisasi dan kepentingan nasional. SDM juga merupakan potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Pada penyerapan anggaran SDM memiliki hubungan yang erat mengingat dalam ruang lingkup suatu SKPD SDM sangat diperlukan sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa yang sebaiknya memiliki sertifikat dan berkompotensi karena jika SDM dalam suatu SKPD sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa kurang berkompotensi dan tidak memiliki sertifikat maka dapat menyebabkan pelaksanaan atas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

SDM memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sehingga faktor SDM menjadi salah satu variabel independen pada penelitian ini. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan butir pertanyaan

sebanyak tiga pertanyaan dalam sebuah kuisioner. Kuisioner ini telah dikembangkan dalam penelitian Herriyanto (2012).

3.2.1.4 Dokumen Pengadaan

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. LPSE sering dirancukan dengan sistem e-procurement (pengadaan secara elektronik). Pada proses pengadaan LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan/ULP. (Wikipedia.org).

Dokumen pengadaan berisi pengumuman mengenai lingkup pekerjaan, persyaratan peserta, waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen, serta penanggung jawab kegiatan pengadaan. Selain itu berisi undangan kepada penyedia barang/jasa, instruksi kepada peserta pengadaan, bentuk penawaran dan perjanjian, syarat-syarat kontrak, data kontrak, spesifikasi teknis dan daftar kuantitas dan harga. Dokumen pengadaan memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, karena didalam dokumen pengadaan tertuang daftar kuantitas dan harga suatu barang yang akan dibeli untuk keperluan suatu instansi. Sehingga dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebaiknya dilakukan melalui survei pasar agar tidak menyebabkan ketidaksesuaian harga suatu barang dalam proses pengadaan. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dokumen pengadaan memiliki pengaruh

terhadap penyerapan anggaran, sehingga dokumen pengadaan menjadi salah satu variabel independen pada penelitian ini. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan butir pertanyaan sebanyak tiga pertanyaan dalam sebuah kuisisioner. Kuisisioner ini telah dikembangkan dalam penelitian Herriyanto (2012).

3.2.1.5 Uang Persediaan (UP)

Dalam kegiatan pemerintahan sering adanya pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Penggunaan atas kegiatan inilah yang menyebabkan penggunaan atas uang persediaan yang menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran untuk nantinya harus dibayar dengan ganti uang persediaan melalui Surat Perintah Membayar (SPM). SPM-GUP merupakan surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang dananya nanti akan dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. Sedangkan Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Pada suatu instansi sering terjadi adanya pengajuan UP sebanyak dua kali dikarenakan kebutuhan perkantoran memerlukan dana yang cukup besar, sehingga adanya pengajuan uang persediaan ini mempengaruhi penggunaan anggaran. Uang Persediaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sehingga faktor Uang Persediaan menjadi salah satu variabel independen pada penelitian ini. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala

Likert lima poin dengan butir pertanyaan sebanyak tiga pertanyaan dalam sebuah kuisisioner. Kuisisioner ini telah dikembangkan dalam penelitian Herriyanto (2012).

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Nama lain dari variabel ini adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau variabel konsekuensi (Indriantoro dan Supomo, 2002). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan anggaran.

3.2.2.1 Penyerapan Anggaran

Rendahnya tingkat penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator kegagalan birokrasi, karena penyerapan anggaran memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran akan dibahas dalam penelitian ini.

Pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu masih sering terjadinya penyerapan anggaran yang belum maksimal. Untuk mengatasi agar penyerapan anggaran yang rendah tidak terjadi lagi, pemerintah Provinsi Bengkulu mengadakan rapat evaluasi secara rutin guna mengetahui kendala atau persoalan yang dihadapi oleh masing-masing SKPD sehingga persoalan tersebut dapat dicari jalan keluarnya secepat mungkin dan tidak menghambat proses pembangunan. Variabel penyerapan anggaran diukur dengan menggunakan skala likert antara 1 sampai 5. Skor terendah (1) dari jawaban responden menunjukkan rendahnya penyerapan anggaran dan skor tertinggi (5) menunjukkan penyerapan anggaran yang tinggi.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah 11 SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik pengumpulan data secara *purposive sampling*, yaitu untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria tertentu dibutuhkan karakteristik sampling. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang menduduki jabatan dibidang yang berkaitan dengan anggaran yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), PP SPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) dan Bendahara Pengeluaran dimasing-masing SKPD, sehingga jumlah sampel menjadi 44 responden. Sampel diambil di 11 SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu diantaranya adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag dan UKM), Dinas Pendidikan (Diknas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Dinas Perkebunan (Disbun) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan dalam sebuah kuisisioner yang akan diisi oleh responden. Butir pertanyaan dan pilihan jawaban dalam kuisisioner disesuaikan dengan variabel-variabel yang akan diukur. Kuisisioner akan diantarkan langsung kepada responden, dan jika memungkinkan kuisisioner akan langsung diambil kembali setelah diisi oleh responden. Namun, jika tidak memungkinkan maka kuisisioner akan diambil paling lambat 1 minggu setelah penyerahan atau sesuai waktu yang telah disepakati dengan responden. Kuisisioner yang diajukan kepada 11 SKPD diantaranya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag dan UKM), Dinas Pendidikan (Diknas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Dinas Perkebunan (Disbun) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Kuisisioner diukur menggunakan skala likert dengan menggunakan penilaian yang pertama yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju dan penilaian sangat sering, sering, kadang-kadang, pernah dan tidak pernah.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Science). Beberapa teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

3.5.1 Uji Kualitas Data

3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan coefficient corelation pearson yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor setiap konstruknya signifikan pada 0,05 atau 0,01 maka pernyataan tersebut dikatakan valid Ghozali(2011).

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten (Ghozali, 2011). Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji ini dilakukan dengan menggunakan koefisien crobach alpha dengan bantuan program SPSS 16.0 Cara untuk mengukur reliabilitas dengan Cronbach's Alpha dengan kriteria lebih dari 0,7 adalah reliabel.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan nilai $Sig \geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai $Sig < 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau indepenen. Pengujian dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas (indeks), dilakukan dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance value (Ghozali,2011). Batas dari tolerance value adalah $> 0,10$ atau nilai $VIF < 10$.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011), uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai errornya). Model regresi yang baik adalah *Homoskedastisitas* bukan *Heteroskedastisitas*.

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Glejser. Pengujian ini membandingkan signifikansi dari uji tersebut terhadap α sebesar 5%.

3.5.3 Uji Hipotesis

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh dokumen perencanaan (X1), pencatatan administrasi (X2), kompetensi SDM (X3), dokumen pengadaan (X4), dan uang persediaan (X5) terhadap penyerapan anggaran (Y). Rumus regresi yang digunakan adalah :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dalam hal ini adalah :

b_0 = Konstanta

X_1 = dokumen perencanaan

X_2 = pencatatan administrasi

X_3 = kompetensi SDM

X_4 = dokumen pengadaan

X_5 = uang persediaan

Y = penyerapan anggaran

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = Koefisien regresi untuk X_1, X_2, X_3, X_4, X_5

e = *error term*

3.5.3.1 Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. kriteria pengujian berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (α), maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. jika lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.2 Uji koefisien determinasi disesuaikan (AdjustedR2)

Nilai AdjustedR2 ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($\text{AdjustedR}^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $\text{AdjustedR}^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $\text{AdjustedR}^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.

3.5.3.3 Uji statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian dilakukan berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap terhadap variabel dependen. Namun jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (α), maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap terhadap variabel dependen.